

POLITICAL WILL PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM PENGADAAN AIR BERSIH TAHUN 2018-2019

Oleh : Siti Nazurah

Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Clean water is one of the most important and very sensitive basic needs in human life, as well as being a basic need for the community. The need and use of clean water from year to year is increasing in line with the development of population and housing, this is directly proportional to the population growth of Dumai City which continues to increase, making the need for clean water increasing day by day. This causes the Dumai City community's rights to be unfulfilled for clean water services provided by the government. Therefore, it is very necessary to have a will or Political Will of the Dumai City Government in the provision of clean water. The purpose of this study was to determine the Political Will of the Dumai City Government in Procurement of Clean Water in 2018-2019. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques are interviews and documentation.

The results of the study explain that the Political Will of the Dumai City Government in the Procurement of Clean Water in 2018-2019 is not yet optimal. This is because first, the Dumai City Government's initiative in the provision of clean water is considered only limited to planning and formulation. Second, the clean water supply program always experiences delays from the planned timeline and the amount of water distributed does not meet the needs of the people of Dumai City. Third, the Dumai City Government does not involve the community in the clean water supply process. Fourth, the Dumai City Government has not been able to maximize the existing budget properly. Fifth, the sustainability of the Dumai City Government's efforts in the provision of clean water is considered to be lacking. Sixth, the Dumai City Government still has not implemented lessons from areas with better clean water conditions.

Keywords: Political Will and Clean Water Supply

PENDAHULUAN

Permasalahan pemenuhan hajat hidup orang banyak yang selalu menjadi masalah bagi pemerintah salah satunya adalah pelayanan air bersih. Air bersih termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat sensitif dalam kehidupan manusia, sekaligus menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan dan penggunaan air bersih dari tahun ke tahun semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya penduduk dan perumahan. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan yang sangat serius, sehingga air yang bersih dan sehat menjadi suatu isu dan problema global di Indonesia.

Fenomena program air bersih kota Dumai masih jadi keluhan warga, program unggulan yang digadang gadang pejabat orang nomor satu Pemko Dumai saat janji politik yang disampaikannya pada Pemilu pada hingga kini masih menjadi sebatas harapan. Terbukti dari sejumlah masyarakat kota Dumai guna memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari harus merogoh kocek lebih dalam sebagai biaya beli air bersih kebutuhan rumah tangga, banyak masyarakat Dumai terpaksa harus membeli air bersih untuk keperluan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum pada Pasal 13 UPT Air Minum Kota Dumai memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan air minum yang berkualitas dan optimal bagi pelanggan atau konsumen sesuai dengan kemampuan kapasitas produksi yang tersedia.
2. Membantu pelanggan atau konsumen dalam memahami hak dan tanggung jawab.

3. Menerima pengaduan dari pelanggan atau konsumen tentang pelayanan air minum.
4. Memperbaiki saluran distribusi air minum yang rusak.
5. Mengganti meteran air atau pipa yang rusak akibat teknis.
6. Memberitahukan kepada pengguna jasa tentang adanya gangguan hambatan pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan.

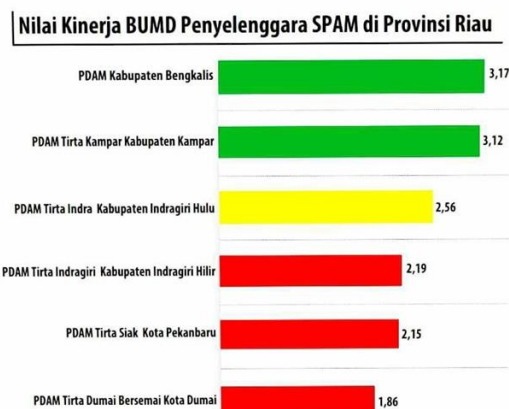
Adapun hak bagi masyarakat atau pengguna jasa air minum menurut Peraturan daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2011 pada pasal 14 adalah sebagai berikut :

1. Menerima pelayanan air minum dari penyelenggara yang berkualitas dan optimal.
2. Meminta pengujian atas kebenaran tagihan rekening air minum bulanan.
3. Membuat pengaduan atas pelayanan air minum.
4. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. (*Perda-Dumai-No.-16-Tahun-2011*, n.d.)

Political Will atau keinginan politik yang diartikan sebagai "niatan pimpinan" untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Keinginan politik (*Political will*) juga diartikan apabila negara mempunyai kemauan, tetapi tentunya harus didukung oleh rakyat. Brinkerhoff (2010) memberikan pengertian secara teoritis, *political will* adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan. Menurut Brinkerhoff, ada beberapa indikator untuk mengukur *political will* pemerintah, yaitu inisiatif pemerintah, pilihan kebijakan, mobilisasi para pihak, komitmen publik dan alokasi sumberdaya, keberlanjutan usaha, dan belajar beradaptasi. (Brinkerhoff, 2010)

Gambar 1

**Nilai Kinerja BUMD Penyelenggara
SPAM di Provinsi Riau**



Sumber Buku Kinerja SPAM 2019

Berdasarkan data dari grafik diatas maka dapat dilihat kinerja penyelenggara sistem penyediaan air minum atau air bersih di kota Dumai pada tahun 2019 berada ditingkat paling bawah dari 6 PDAM yang terdata. Maka dari itu PDAM Tirta Bersemai milik pemerintah kota Dumai termasuk PDAM kategori sakit. Pada tahun 2019 dari seharusnya diharapkan yaitu 100% pelayanan, PDAM di kota Dumai hanya mampu melayani 22,17% cakupan pelayanan saja, juga pada tahun tersebut pertumbuhan pelanggan air bersih berkurang sebanyak -10,70%. Maka berdasarkan angka tersebut jumlah kalkulasi kinerja sistem penyediaan air bersih dikota Dumai hanya sebesar 1,86% saja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu kemauan pemerintah terkait dengan pelayanan air bersih agar lebih baik lagi. Political Will atau keinginan politik yang diartikan sebagai “niatan pimpinan” untuk melakukan hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Keinginan politik juga diartikan apabila negara mempunyai kemauan, tetapi tentunya harus didukung oleh rakyatnya.

Brinkerhoff (2010) memberikan pengertian secara teotitis, political will adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai usaha berkela *Political will* ini amat penting, lebih-lebih ditengah perhatian terhadap upaya pengadaan pelayanan air bersih di Kota Dumai yang sangat rendah. Tanpa *political will* itu apapun yang akan pemerintah rencakanya semuanya tidak akan membawa hasil yang memuaskan. Menurut Brinkerhoff , ada beberapa indikator untuk mengukur *political will* pemerintah, yaitu inisiatif pemerintah, pilihan kebijakan, mobilisasi para pihak, komitmen publik dan alokasi sumberdaya, keberlanjutan usaha, dan belajar beradaptasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang, maka rumusah masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah *Political Will* Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengadaan Air Bersih di Kota Dumai ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai tujuan antara lain :

Mengetahui *Political Will* Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengadaan Air Bersih di Kota Dumai.

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

- (Adlin, 2019) dengan judul penelitian Pengembangan *Political Will* Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren Di Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.
- (Fauzy, 2015) dengan judul penelitian *Political Will* Pemerintah Kabupaten

Pelawannya terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012.

- (M.Y. Tiyas Tinov, 2014) dengan judul penelitian pelayanan pengadaan air bersih oleh unit pelaksana teknis (upt) air minum Kota Dumai tahun 2011-2012.

- (Suyeno; Wijaya, 2014) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kecamatan Mandau.

- (Yuliani & Rahdriawan, 2014) dengan judul Kinerja Pelayanan Air Bersih Berbasis Masyarakat di Kelurahan Tugurejo Kota Semarang.

Kerangka Teori

Political Will

Political will merupakan kemauan politik atau harapan politik sebagai suatu tindakan dalam kegiatan yang melibatkan publik, masyarakat, baik dalam suatu organisasi masa maupun politik bertumpu kepada etika yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Brinkerhoff (2010) memberikan pengertian secara teoretis, *political willingness* adalah kesediaan dan komitmen politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan. *Political willingness* atau keinginan politik yang diartikan sebagai “niatan pimpinan” untuk

melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang.

Indikator *Political Will*

Menurut Derick (1990) dalam (Rohmat, 2013) mengemukakan beberapa indikator yang bisa dipergunakan untuk mengukur *political will* pemerintah, yaitu:

1. Inisiatif Pemerintah
2. Pilihan Kebijakan/Program

3. Mobilisasi Para Pihak

4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumberdaya

5. Keberlanjutan Usaha

6. Belajar dan Beradaptasi

Pengadaan Air Bersih

Pengertian Air Bersih

Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. (*Undang Undang No 17 Tahun 2019, 2019*)

Menurut (Triatmadja, 2008) Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pelayanan Penyediaan Air Bersih

Pelayanan Secara Teknis

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang air minum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sub Bidang Air Minum Pada Pasal 1 Ketentuan Umum dinyatakan :

1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
4. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Pelayanan Secara Non-Teknis

Aspek non teknis dalam penyediaan air bersih berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah yang tertuang dalam regulasi tentang penyediaan air bersih, maupun kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh PDAM sebagai badan usaha yang berwenang untuk penyediaan air bersih bagi warga masyarakat. Pelayanan non teknis juga berkaitan dengan keuangan, komunikasi, keterlibatan pihak swasta dan partisipasi masyarakat untuk terselenggaranya penyediaan air bersih tersebut.

Menurut (Abidin, 2013) aspek non teknis dalam penyediaan air bersih berkaitan dengan ketersediaan keuangan yang dianggarkan dalam APBD/APBN, peluang investasi dalam sektor air bersih bagi warga. Bantuan dana dari donatur, baik secara individu maupun organisasi. Aspek non teknis lainnya adalah komunikasi. Peranan media dalam penyediaan informasi tentang kondisi air,

interaksi antara produsen dan konsumen, antara pemerintah dan warga masyarakat dan antar sesama warga masyarakat guna menggerakkan ketersediaan air bersih dan kejelasan prosedur dan administrasi bagi konsumen.

Menurut (Naway, 2013) aspek non teknis berkaitan dengan kelengkapan administrasi sebagai instrument esensial dalam memberikan pelayanan publik. Prosedur dan administrasi dalam birokrasi penyediaan air bersih menjadi mutlak sehingga kegiatan penyediaan air bersih sebagai bentuk pelayanan publik dapat terselenggara secara rapi dan teratur. Kelengkapan instrumen administratif dikomunikasikan kepada warga masyarakat melalui berbagai media, baik media elektronik, media cetak, papan pengumuman maupun komunikasi secara verbal.

Metode Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.

Format penelitian ini ialah format deskriptif yang bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi.

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran sejauh mana *Political Will* pemerintah kota Dumai dalam pengadaan air bersih pada tahun 2018-2019. Jenis penelitian yang

digunakan ini bersifat deskriptif dan mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

Hasil dan Pembahasan

***Political Will* Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengadaan Air Bersih Pada Tahun 2018-2019**

Political Will merupakan kemauan politik atau harapan politik sebagai suatu tindakan dalam kegiatan yang melibatkan public, masyarakat, baik dalam suatu organisasi masa maupun politik bertumpu kepada etika yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai suatu tujuan. *Political Will* ini amat penting terlebih ditengah perhatian terhadap upaya pengadaan pelayanan air bersih di Kota Dumai yang sangat rendah.

Kemauan politik yang dimiliki oleh pemerintah Kota Dumai saat ini masih tergolong kurang terbukti dari tidak meratanya pelayanan air bersih yang diberikan oleh pemerintah, tidak hanya itu pada tiap tahunnya pemerintah Kota Dumai tidak konsisten terhadap pelayanannya, dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan air bersih tidak selalu meningkat pada tiap tahunnya. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Riau Satrya Alamsyah, ST,MT selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Dumai, dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa : *“berkaitan dengan pengadaan air bersih di Kota Dumai ini maka pemerintah membentuk PDAM untuk membantu kami dalam pengadaan pelayanan air bersih ini. Walaupun dari awal terbentuknya PDAM memang dalam keadaan yang sakit, bahkan sampai saat ini kondisi PDAM Kota Dumai masih saja belum beranjak dari kondisi sakit. Dari awal terbentuk pada tahun 2014 perusahaan air bersih ini sempat stuck dan berhenti sampai tahun 2017 dan baru mulai merintah lagi sejak tahun 2018. Sebagai*

public service kami tentunya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin kebutuhan masyarakat akan air bersih, terlebih lagi disaat kondisi Dumai yang bisa dibilang krisis akan air bersih.”

Dari kutipan diatas memang benar adanya kondisi air bersih di Kota Dumai dalam keadaan sakit. Tercantum pula di buku Kinerja Perusahaan Air Minum bahwa sejak berdirinya PDAM di Kota Dumai selalu dalam kondisi “Sakit”, tak hanya itu dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Riau, Kota Dumai selalu berada diposisi akhir dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, sementara dalam memberikan tarif air Kota Dumai berada diposisi teratas dengan jumlah sebesar Rp. 9.726/m3, tarif ini merupakan tariff termahal dan juga tertinggi jika dibandingkan dengan daerah yang ada di Provinsi Riau lainnya. (Kinerja SPAM2019, n.d.)

Melihat permasalahan pengadaan air bersih di Kota Dumai, maka perlu untuk melihat *Political Will* Pemerintah, khususnya dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat. Permasalahan air bersih ini sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah mengingat air merupakan kebutuhan dasar terpenting dan menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Untuk menilai *Political Will* Pemerintah Kota Dumai dalam pengadaan air bersih maka dapat dilihat dari beberapa indicator. Menurut Derick W. Brinkerhoff mengemukakan setidaknya ada 6 komponen dalam *Political Will* yaitu :

1. Inisiatif Pemerintah
2. Pilihan Kebijakan/Program
3. Mobilisasi para Pihak
4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumberdaya
5. Keberlanjutan Usaha
6. Belajar dan Beradaptasi

1. Inisiatif Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengadaan Air Bersih Pada Tahun 2018-2019

Inisiatif berarti adanya suatu tindakan yang berasal dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Inisiatif dibutuhkan untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kebaikan bersama. Inisiatif pada suatu pemerintahan dapat berupa program real atau kebijakan yang harus dijalankan demi tercapainya suatu tujuan. Inisiatif yang dilakukan tentunya berasal dari pemikiran yang matang dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Inisiatif juga haruslah bersifat fleksibel atau mampu menyesuaikan dengan aturan yang sudah ada dan masih berlaku, agar tujuan yang tadinya baik tidak malah akan menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan air bersih ini maka sangat dibutuhkan inisiatif dari pemerintah Kota Dumai, baik dalam bentuk kebijakan maupun tindakan nyata lainnya.

Sementara strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai misi meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau antara lain ialah :

1. Perbaikan dan penyelesaian infrastruktur jaringan perpipaan ekstising.
2. Koordinasi lintas *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan jaringan perpipaan, jaringan kabel bawah tanah dan sistem drainase.
3. Meningkatkan kualitas jaringan perpipaan bagi pelanggan rumah tangga.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas distribusi air melalui kran umum dan hydranat umum.
5. Meningkatkan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

6. Meningkatkan luas daerah resapan air (Dumai, 2017)

Sementara itu, pihak PDAM melalui bapak Amir Syahrudin, MM, selaku Kepala Bagian Administrasi Umum & Keuangan, dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa: *“Berbicara mengenai inisiatif untuk air bersih ini, tentunya kami dan pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Disamping itu pula tidak dapat dipungkiri bahwa tugas PDAM adalah untuk membantu pemerintah, PDAM disini dibentuk oleh pemerintah sebagai operator dan bertugas mengeksekusikan semua arahan yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Sejauh ini inisiatif pemerintah Kota Dumai bersama PDAM dalam pengadaan air bersih terdapat tiga program system penyediaan air minum yaitu, SPAM KPBU; SPAM NUWSP; dan SPAM DUROLIS. Tentunya semua program ini dilakukan secara bertahap, setiap programnya memiliki tahapan yang harus dilalui sebelum dapat diterima oleh masyarakat luas, maka dari itu kami menghimbau masyarakat Dumai untuk bersabar sedikit lagi demi tercapainya tujuan kita semua.”*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari sarana dan prasarana air minum. Sementara pada pasal 7 menjelaskan bahwa kegiatan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Berdasarkan pada pemaparan tentang inisiatif pemerintah dalam pengadaan air

bersih di Kota Dumai, maka dapat dilihat bahwa sebenarnya inisiatif pemerintah sudah cukup baik, hal ini terbukti dari semua program yang dirumuskan oleh pemerintah terlebih lagi pemerintah juga menggandeng pihak swasta untuk menjalin kerjasama.

Namun kita tidak boleh lupa bahwa inisiatif pada suatu pemerintahan itu terwujud atau dapat kita nilai pada program real yang dijalankan oleh pemerintah. Program real itu sendiri merupakan program yang sudah direalisasikan oleh pemerintah dan program tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran dari program tersebut, dan program tersebut juga sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Maka dari itu jika pemerintah hanya berinisiatif namun tidak dijalankan atau direalisasikan sama saja seperti tidak melakukan apa-apa, begitulah yang terjadi di Kota Dumai dimana kondisi masyarakatnya yang mengalami krisis air bersih. Pada tahun 2019 dari 380 total PDAM penyelenggaraan SPAM yang ada di Indonesia, Kota Dumai berada di posisi 352 dengan nilai kinerja sebesar 1,86% dengan status sakit. (Kinerja SPAM 2019, n.d.)

2. Pilihan Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018-2019

Dalam usaha pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat, inisiatif saja tidaklah cukup namun harus dibarengi dengan implementasi inisiatif tersebut dengan baik. Jika sudah ada inisiatif maka perlu adanya tindakan lanjut untuk mewujudkan inisiatif tersebut agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dengan menjadikan inisiatif tersebut sebagai prioritas, agar dari segi waktu dapat terlaksana dengan efisien dan dari segi ketepatan dapat terlaksana dengan akurat.

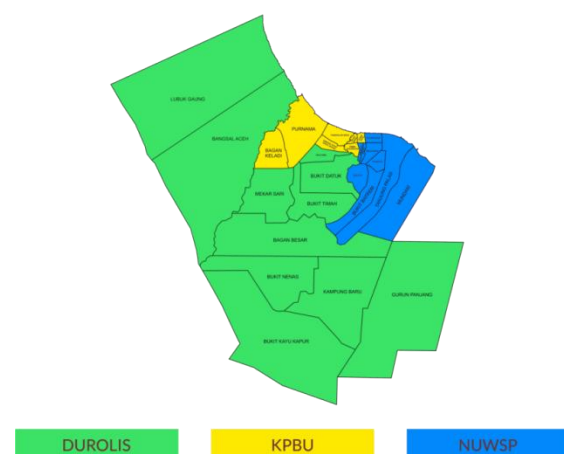
Sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan

pembangunan dengan segala aktivitasnya, kebutuhan akan air bersih tentunya akan ikut meningkat, permasalahan yang kita hadapi semakin kompleks terutama di perkotaan. Hal ini disebabkan laju kebutuhan air bersih tidak sebanding dengan laju ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan, disebabkan oleh beberapa hal seperti air baku yang terbatas baik secara kualitas maupun secara kuantitas serta sistem pengelolaan yang belum maksimal.

Namun saat ini pelayanan air bersih yang diberikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai belum sepenuhnya memuaskan pelanggan yang ada, selain itu juga belum menjangkau wilayah yang tingkat ketergantungan akan pelayanan air bersih oleh PDAM sangat tinggi. Hal ini dikarenakan kuantitas air bersih yang dihasilkan oleh PDAM masih rendah yaitu sebesar 10 Liter / detik. Dalam memenuhi permintaan akan air bersih, PDAM bersama dengan Pemerintah Kota Dumai mempunyai program-program dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan akan air bersih.

Gambar 2

Peta Pembagian Wilayah SPAM di Kota Dumai



Sumber : PDAM Tirta Bersemai Kota Dumai

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Sistem Penyediaan Air Regional DUROLIS memiliki wilayah pelayanan paling luas di Kota Dumai dengan total target 40.000 sambungan rumah, lalu diikuti oleh Sistem Penyediaan Air KPBU dengan total target pencapaian pelayanan yaitu 20.300 sambungan rumah, dan yang terakhir Sistem Penyediaan Air Minum NUWSP dengan total 4.000 sambungan rumah sebagai target pelayanannya.

Jika ditelaah lagi program dan proyek yang direncanakan Pemerintah Kota Dumai dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih sudah bisa dibilang baik. Namun setiap program belum dijalankan dengan cukup baik menimbang pelayanan yang masih saja belum mumpuni untuk memfasilitasi seluruh masyarakat Dumai. Setiap program selalu saja mengalami keterlambatan dari apa yang sudah direncanakan, dengan anggaran yang sangat besar seharusnya hal ini tidak terjadi, maka dari itu Pemerintah Kota Dumai dituntut untuk lebih fokus dan terarah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui air bersih ini. Tak hanya itu, masalah air bersih ini selalu jadi misi utama dan prioritas utama pembangunan Kota Dumai dari sejak dulu, maka dari itu kedepannya pemerintah harus lebih baik lagi.

Mobilisasi Para Pihak yang Terlibat Dalam Pengadaan Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2018-2019

Ada tidaknya keinginan politik juga tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menggalang dukungan bagi suatu program atau kebijakan. Program yang dijalankan harus mendapat dukungan dari kekuatan politik lain. Jika tidak ada dukungan, riwayat pemerintah akan singkat karena keburu digantikan pemerintah baru. Tanpa dukungan politik juga bisa menjadikan. Artinya semua pihak, dilingkungan eksekutif maupun legislatif harus turut mendukung program atau suatu kebijakan.

Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan. Mobilisasi para pihak yang terlibat dalam pengadaan air bersih di Kota Dumai ini dimaksudkan adalah pengarahannya menggerakkan seluruh instansi pemerintah yang terlibat dalam pengadaan air bersih di Kota Dumai dengan tujuan agar pengadaan air bersih ini dapat berjalan dengan maksimal.

Dengan demikian, maka pemerintah harus menggerakkan seluruh instansi dan elemen masyarakat yang terlibat dalam proses pengadaan air bersih di Kota Dumai, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta masyarakat yang terlibat didalamnya.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak Dinas PUPR melalui bapak Riau Satrya Alamsyah, ST, MT, selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Dumai, dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa : *“Kita bekerjasama dengan Kementerian PUPR tentunya, kemudian tentu masih ada namanya BPSSPAM yaitu Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sekarang sudah dibubarkan Pak Jokowi itu, kemudian kita juga bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau dengan Dinas PUPR Provinsi Riau, kemudian kita juga koordinasi dengan Balai SDA yang ada di Provinsi Riau, setelah itu kita juga bekerjasama dengan Bank Dunia dalam menyelenggarakan SPAM NUWSP tadi. Kita juga bekerjasama dengan swasta sebagai investor yaitu PT Adi Karya dan PT Adaro. Dalam proyek DUROLIS Kota Dumai tentunya membangun relasi dengan daerah yang terlibat didalamnya, yaitu Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis.”*

Dari pemaparan narasumber diatas maka dapat dilihat dalam mobilisasi para pihak Pemerintah Kota Dumai

menggandeng beberapa pihak yang terkait guna untuk mempermudah urusan program penyediaan air bersih di Kota Dumai, seperti pemerintah bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Provinsi Riau. Pemerintah Kota Dumai juga melibatkan swasta dalam penyelenggaraannya, yaitu PT Adi Karya dan PT Adaro.

Menanggapi pernyataan dari pemerintah terkait dengan mobilisasi pihak yang terlibat dalam pengadaan air bersih, maka masyarakat masih merasa kurang dilibatkan dalam persoalan air bersih ini. Hal ini dapat dilihat dari penuturan salah satu masyarakat Kota Dumai, Roni Asril yang juga belum merasakan air bersih dirumahnya, yaitu sebagai berikut : *“Kami masyarakat merasa tidak pernah terlibat dalam proses air bersih ini, pemerintah tidak pernah mendatangi kami untuk menjelaskan bagaimana kelanjutan air bersih, yang ada masyarakat yang mendatangi kantor PDAM untuk memberikan keluhan perihal ini. Sampai disana pun kami tetap juga dapat air bersih, disuruh menunggu sampai giliran rumah kami dapat air bersih. Jadi pemerintah ini cenderung diam padahal banyak masyarakat yang sudah resah bahkan pasrah mengenai masalah air bersih.”*

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak pemerintah maupun pihak masyarakat, maka pemerintah sudah merasa melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan air bersih hingga ke masyarakat. Namun berdasarkan pada penelusuran terhadap pihak masyarakat, maka masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pelayanan air bersih. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi atau berdiskusi dengan masyarakat terkait dengan pengadaan air bersih di Kota Dumai, sehingga masyarakat mengetahui permasalahan mengenai keterhambatan pelayanan air bersih tersebut.

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat dilihat bahwa pihak Pemerintah Kota Dumai tidak melibatkan masyarakat dalam persoalan pengadaan air bersih di Kota Dumai, sementara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum pada Pasal 13 point 6 Unit Pelaksana Teknis Air Minum Kota Dumai memiliki kewajiban “Memberitahukan kepada pengguna jasa tentang adanya gangguan, hambatan pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan air minum.”

Oleh karena itu, dimasa yang akan datang, pihak Pemerintah Kota Dumai harus lebih meningkatkan mobilitas para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan air bersih.

Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya Dalam Pengadaan Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2018-2019

Komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Komitmen sendiri bisa dilakukan dengan cara suka rela atau tanpa unsur paksaan. Banyak orang menjalani komitmen pada sesuatu karena mencintai apa yang mereka lakukan.

Komitmen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tindakan dari pemerintah secara sukarela dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah untuk pengadaan air bersih ini seperti sumber daya modal (uang) maupun sumber daya lainnya.

Komitmen pemerintah Kota Dumai telat terlihat secara kelembagaan yang dibuktikan dengan telah dibuatnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai pada tahun 2016-2021 dengan menjadikan pelayanan air bersih

sebagai prioritas misi pembangunan yang pertama.

Sistem PDAM Kota Dumai pada umumnya berada dalam kondisi operasional yang kurang baik. Namun demikian diketahui bahwa pemeliharaan terhadap beberapa pompa kurang memadai begitu juga kondisi pipa transmisi yang sering bocor karena usia pipa yang relatif sudah lama terpasang, dengan demikian mengurangi kapasitas dan membatasi sambungan baru yang potensial pada daerah-daerah tertentu. Kehilangan air di seluruh daerah layanan dibawah 20% dalam sistem distribusi.

Untuk mencukupi air pelanggan di area pelayanannya, PDAM Kota Dumai memanfaatkan sumber air baku berupa air permukaan yaitu Sungai Mesjid. Sistem pengambilan yang digunakan pada sistem penyediaan air minum menggunakan sistem sumuran/intake.

Sungai Mesjid merupakan satu-satunya sungai yang mengalir di wilayah Kota Dumai memiliki debit yang fluktuatif. Dari data Rekomendasi Teknik yang dikeluarkan BWS Sumatera III pada saat musim penghujan aliran Sungai Mesjid dapat memiliki kapasitas aliran hingga ± 44.50 m³ per detik. Namun saat musim kering hanya dapat mengalirkan air dengan kapasitas sekitar $\pm 5,44$ m³ per detik.

Untuk sumber air permukaan, Kota Dumai memiliki 15 buah sungai yang seluruhnya memiliki karakteristik air gambut, yang sebagian besar air tanah di Kota Dumai bersifat payau.

Berdasarkan pada hasil penelusuran terhadap Komitmen Publik dan Alokasi Sumber daya Dalam Pengadaan Air Bersih di Kota Dumai, maka dapat dilihat bahwa sebenarnya pemerintah sudah berkomitmen dalam memberikan pelayanan air bersih yang merata dan berkualitas hal ini dijadikan pula visi utama pembangunan Kota Dumai pada RPJMD periode 2016-2021, pemerintah

juga tidak sedikit mengalokasikan anggaran dana untuk pembangunan air bersih di Kota Dumai, selain itu dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) pihak PDAM sudah dapat dikatakan baik, dilihat dari seringnya PDAM melakukan workshop yang bekerjasama dengan PDAM yang kinerjanya lebih baik. Namun dibalik itu semua ada kondisi Kota Dumai yang krisis akan air bersih, hal ini menjadikan terhambatnya pemberian pelayanan air bersih kepada masyarakat, Kota Dumai saat ini hanya memiliki satu sungai yang dijadikan sebagai sumber air baku.

Keberlanjutan Usaha Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengadaan Air Bersih Tahun 2018-2019

Keberlanjutan usaha adalah sebuah kondisi disaat instansi memiliki kecukupan dana untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya/kegiatan. Keberlanjutan usaha selalu berkaitan dengan kebangkrutan/kekurangan sumber daya. Pada umumnya setiap instansi selalu lebih memperhatikan suatu kondisi yang berpotensi merugikan. Keberlanjutan Usaha adalah kesinambungan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai guna mendukung pengadaan air bersih di Kota Dumai.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak Dinas PUPR melalui bapak Riau Satrya Alamsyah, ST, MT, selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Dumai, dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa : “ *Kesinambungan kita memang sudah membuat rencana di RPJMD untk program kita tahun ke tahun, yang kita harapkan adalah kita bisa melayani sekitar 36.000 sambungan rumah yang hampir 50% penduduk di perkotaan. Dan kita juga mencoba untuk melakukan upaya untuk mengkonservasi sumber air baku, karna kondisi sekarang air baku yang sedikit maka di khawatirkan tidak adanya kesinambungan nanti, kita juga mungkin akan membuat peraturan-peraturan lainnya untuk menjaga sumber*

air baku tersebut. Kami juga bersama PDAM terus menggiatkan pembangunan embung air yang merupakan upaya menjaga ketersediaan air.”

Berdasarkan penelusuran media Online memang benar adanya Pemerintah Kota Dumai merencanakan Normalisasi dan Pembangunan Embung Taman Wisata Alam Sungai Dumai, dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau. Dijelaskan bahwa pembangunan embung ini dengan tujuan mengendalikan banjir yang selama ini terjadi di Kota Dumai, kemudian mengendalikan kebakaran lahan serta menjaga kualitas air agar bermanfaat bagi masyarakat dan keseimbangan alam. Namun pembangunan embung ini masih sebatas perencanaan dan riset lapangan saja, karna dianggap perlu kajian lebih dalam lagi agar dapat terealisasi dengan baik.(Riau, 2021)

Selain itu dalam bentuk upaya kerberlanjutan usaha pengadaan air bersih di Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai bersama Kementrian PUPR dan berbagai pihak yang terkait dalam pembangunan SPAM NUWSP menggunakan teknologi *Nano Filter* atau *Hollow Fiber Nano Filter* (HFNF). Dengan kelebihan utamanya berteknologi *Nano Filter* atau *Hollow Fiber Nano Filter* (HFNF) yang Pertama di Indonesia ini siap untuk beroperasi dan rencananya akan segera diresmikan. Selain mampu menghasilkan air standar layak minum dengan biaya produksi yang sangat rendah, juga karena baru pertama kali diaplikasikan di Indonesia yaitu di Kota Dumai, maka IPA SPAM dengan Nano Filter tersebut akan menjadi pilot project pengolahan air didaerah gambut menjadi air layak minum. Proses penyaringan air menggunakan nano filter sudah otomatis menggunakan sistem komputerisasi untuk menghasilkan output air minum yang berkualitas juga layak diminum.(SPAM Berteknologi Nano Filter, 2020)

Karena air bersih termasuk pada kebutuhan utama masyarakat, dan pemerintah Kota Dumai sebagai public service dituntut kedepannya lebih mengutamakan apa yang menjadi misi utama pembangunnya yaitu meningkatkan pelayanan dasar air bersih. Karena pembangunan air bersih merupakan pembangunan yang bertahap dan membutuhkan usaha yang berlanjut maka dari itu pemerintah harus focus dalam pembangunannya.

Belajar dan Beradaptasi yang Dilakukan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengadaan Air Bersih Tahun 2018-2019

Belajar dan beradaptasi adalah kesediaan belajar dan beradaptasi Pemerintah Kota Dumai dalam pengadaan air bersih guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak Dinas PUPR melalui bapak Riau Satrya Alamsyah, ST, MT, selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Dumai, dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa : *“Dalam hal pengadaan air bersih kami terus berusaha untuk berbenah terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami juga mencoba untuk mensosialisasikan ke masyarakat mengenai pengembangan air minum kita yang sedang berlangsung. Untuk menanggapi jenis air baku yang ada di Kota Dumai ini kami bersama Dinas Kesehatan terus belajar untuk mengolah supaya bagaimana air yang ada di Kota ini bisa layak dikonsumsi.”*

Kegiatan belajar dan beradaptasi mengenai pengadaan air bersih oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka pemenuhan hak masyarakat akan air bersih sebenarnya sudah cukup baik, dapat dilihat dari keinginan belajar PDAM Tirta Bersemai Dumai dengan PDAM lain yang kinerjanya lebih baik, namun demi tercapainya hasil yang baik PDAM dituntut untuk menerapkan segala hal yang

dipelajari dari kegiatan belajarnya. Penulis yakin jika pemerintah bersama PDAM menerapkan apa yang dipelajari dari dulu maka kondisi pelayanan air bersih saat ini sudah jauh dari kata krisis. Pemerintah juga dituntut untuk belajar dari pengalaman masa lalu untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam pengadaan air bersih di Kota Dumai.

III Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Inisiatif Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengadaan Air Bersih. Inisiatif pemerintah sudah cukup baik, namun hanya sebatas perencanaan dan perumusan kebijakan saja, sehingga sampai saat ini permasalahan air bersih masih menjadi masalah utama di Kota Dumai.

2. Pilihan Kebijakan/Program Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengadaan Air Bersih. Program pengadaan air bersih di Kota Dumai selalu mengalami keterlambatan dari waktu yang sudah di target kan, hal ini pula yang mengakibatkan tertunda nya pelayanan air bersih kepada masyarakat. Jumlah air yang disalurkan pun belum juga mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Dumai.

3. Mobilisasi Para Pihak yang Terlibat Dalam Pengadaan Air Bersih. Dalam pengadaan air bersih ini Pemerintah Kota Dumai tidak melibatkan masyarakat yang seharusnya terlibat karena masyarakat merupakan target pelayanan air bersih tersebut.

4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber daya Dalam Pengadaan Air Bersih. Secara keseluruhan komitmen dan sumber daya dalam pengadaan air bersih di Kota Dumai masih kurang, pemerintah masih belum mampu memaksimalkan anggaran yang ada dan belum dapat mengelola sumber daya yang ada dengan baik.

5. Keberlanjutan Usaha Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengadaan Air Bersih. Dengan berbagai usaha untuk

merencanakan pembangunan kedepannya, keberlanjutan usaha Pemerintah Kota Dumai masih dianggap kurang, terbukti dari air bersih merupakan program lama yang berlarut larut hingga kini belum juga terealisasi dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa keberlanjutan usaha pemerintah dalam mengusahakan air bersih masih kurang.

6. Belajar dan Beradaptasi yang dilakukan Pemerintah Dalam Pengadaan Air Bersih. Dengan melakukan studi banding dan workshop, Pemerintah Kota Dumai sudah menunjukkan itikad baik dalam pengadaan air bersih, namun pemerintah masih belum menerapkan apa yang di dapatkan dari kegiatan tersebut hingga belum ada kemajuan yang baik.

Saran

1. Sebagai bentuk pembuktian inisiatif pemerintah yang baik, Pemerintah Kota Dumai perlu menjalankan program air bersih sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati.

2. Pemerintah Kota Dumai perlu menggiatkan pelaksanaan program air bersih sehingga tidak mengalami keterlambatan dari waktu yang sudah di targetkan.

3. Dalam pelaksanaan program penyediaan air bersih Pemerintah Kota Dumai seharusnya melibatkan masyarakat didalamnya, karena masyarakat merupakan target dari program tersebut.

4. Pemerintah Kota Dumai harus bisa memanfaatkan anggaran dengan semaksimal mungkin untuk menunjang kelangsungan pembangunan air bersih.

5. Sebagai bentuk keberlanjutan usaha, Pemerintah Kota Dumai perlu menggiatkan pelaksanaan kegiatan konservasi air guna menjaga ketersediaan air baku dan menjamin kontinuitas distribusi air bersih di Kota Dumai.

6. Jalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, seperti daerah lain yang memiliki kinerja pelayanan air bersih yang baik. Untuk mendapatkan pelajaran yang nantinya di terapkan di Kota Dumai.

Daftar Pustaka

Buku

Abidin.(2013). *Pengelolaan Hutan dan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat: pembelajaran Dari Way Besai Lampung*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja

Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru : Alaf Riau

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). (2019). *Buku Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM 2019*. Jakarta

Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia Kodoatie, Robert J. dan Roestam, Sjarief. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta : Andi

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung :Alfabeta

Triatmadja, R. (2008). *Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah

Air Minum

Peraturan Menteri PUPR Nomor 47/PRT/M/2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Keputusan Walikota Nomor 434/DPUPR/2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukkan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai sebagai Penanggung Jawab Proyek KPBU

Artikel Ilmiah

Adlin, A.Y. (2019). *Pengembangan Political Will Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren di KotoTuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar*. Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan. 18(2), 119-120.

Brinkerhoff, D. (2010). *Unpacking The Concept of Political Will to Confront Corruption*. U4 Brief.

Fauzy, A. (2015) . *Political Will Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012*. Jom FISIP. 2 (2). 1-13.

Mirwan Nuzul. (2020). *Kajian sumber air baku dalam mendukung ketersediaan air bersih kota dumai (studi sungai mesjid)*. Jurnal Akrib Juara. 5(1). 217

M.Y. Tiyas Tinov. (2014). *Pelayanan Pengadaan Air Bersih Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Minum Kota Dumai Tahun 2011-2012*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689- 1699.

PT. Bumi Kirana Asri. (2020). *Laporan Pilot Plant Hollow Fiber Direct Nano Filtration Sebagai Teknologi*

Pengolahan Air Gambut

Naway. (2013). *Pengembangan Sistem Pelayanan Air Bersih*. Jurnal Sipil Statik. 1(6). 444-451. Rohmat. (2013). *Political Will Pemilih Figur Kepemimpinan*. Jurnal Studi Agama. 7(2). 464-465.

Suyeno; Wijaya, A. F. dan H. I. (2014). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kecamatan Mandau*. Jurnal WACANA, 17(1), 21–34.

Syahza, A. (2009). *Definisi, Ruang Lingkup, dan Jenis Penelitian*. 1-10

Yuliani, Y., & Rahdriawan, M. (2014). *Kinerja Pelayanan Air Bersih Berbasis Masyarakat di Tugurejo Kota Semarang*. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 10(3), 248.

Dokumen Lainnya

Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Jebat News. (2018). *PDAM Tirta Dumai Bersemai Stuban ke PDAM Bengkalis Laporan Administrasi PDAM Tirta Bersemai Kota Dumai* <https://jebatnews.com/bengkalis/PDAM-Tirta-Dumai-Bersemai-Stuban-ke-PDAM-Bengkali2>

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020) *BPPW Riau Wujudkan Puluhan Tahun Harapan Masyarakat Kota Dumai dengan IPA SPAM In Door Berteknologi Nano Filter Pertama di Indonesia*.

<https://ciptakarya.pu.go.id/balai/riau/berita/detai/SPAM/12732/BPPW/Riau/Wujudkan/Puluhan/Tahun/Harapan/Masyarakat/Kota/Dumai/dengan/IPA/SPAM/InDoor/Berteknologi/Nano/Filter/Pertama/diIndonesia>

Muhardi, F. (2016). *Zul As sebagai inisiator proyek air bersih*. <http://www.riabook.com/berita/6863/zul-as-inisiator-proyek-air-bersih-ditunggu-hingga-2017>.

Prabowo, D. (2019). *Wali Kota Dumai Sebut Kondisi PDAM Sudah Stadium 4 Kompas*. <https://properti.kompas.com/read/2019/04/16/091307621/wali-kota-dumai-sebut-kondisi-pdam-sudah-stadium-4>.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Periode 2016-2021

Riau.go.id (2019). *Kota Dumai*. <https://www.riau.go.id/home/content/5/kota-dumai>

Riau Link, (2021). *Tindaklanjut Normalisasi dan Pembangunan Embung TWA Sungai, BBKSDA Riau Kunjungi Dumai*. <https://riaulink.com/news/detail/18630/tindaklanjut-normalisasi-dan-pembangunan-embung-TWA-sungai-bbksda>